

## SURAT TUGAS

Nomor : 00174/K.6.4/ST/FEB/XI/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

- Nama : **T e r l a m p i r**
- Status : Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
- Tugas : Pemakalah dalam kegiatan Seminar Management Research yang diselenggarakan oleh P3M Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata
- Tempat : Hybrid (Ruang CCPA Program Studi Akuntansi FEB Unika Soegijapranata) dan ZOOM
- Waktu : 2, 16 November 2022
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas.



Semarang, 02 November 2022

Dekan,

**DRS. THEODORUS SUDIMIN, MS**  
NPP : 058.1.1990.074

Lampiran Surat Tugas  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Nomor : 00174/D.5/ST/FEB/XI/2022  
 Tanggal : 02 November 2022

**PEMAKALAH SEMINAR MANAGEMENT RESEARCH  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 UNIKA SOEGIJAPRANATA**

No.	Judul Artikel	Presenter
1	PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN RELEVANSI DENGAN KURIKULUM MERDEKA	Dr. WIDURI KURNIASARI, S.E., M.Si.
2	GREENPRENEURIAL ORIENTATION BERBASIS DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION	POSMARIA SETIASIWI SITO HANG., S.E., M.Si. Drs. A. SENTOT SUCIARTO, M.P., Ph.D. Drs. R. BOWO HARCAHYO, M.B.A. MY. DWI HAYU AGUSTINI, M.B.A., P.hD Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si. SANJAYA PUTRA HARTONO IVAN KAREL TEN, HOSEA APRIYANDI DIONISIUS ANDREW M. S
3	EKSPLORASI IMEJ, PERILAKU, MINAT DAN MOTIVASI PARA KAUM MUDA TERHADAP CURUG 7 BIDADARI DAN DESA WISATA, DESA KESENEANG, KECAMATAN SUMOWONO, KABUPATEN SEMARANG	A. HARYO PERWITO, S.E., MA.TRM. Drs. R. BOWO HARCAHYO, M.B.A. DYAH TITISARI ANUGRAHENI, S.E., M.M. Drs. Y. SUGIHARTO, M.M.
4	PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TEHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN COMPETITIVE ADVANTAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA	Y. WISNU DJATI SASMITO, S.E., M.Si. Drs. B. JUNIANTO WIBOWO, M.S.M. ENY TRIMEININGRUM, S.E., M.S.I.
5	KAJIAN EFEKTIVITAS BANTUAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) MASA PENDEMI COVID-19	MG. WESTRI KEKALIH S., S.E., M.E. Dr. RETNO YUSTINI WAHYUNINGDYAH, M.Si. Dr. CH. YEKTI PRAWIHATMI, S.E., M.Si.
6	PERSEPSI PENGGUNA LULUSAN TERHADAP KINERJA LULUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG TA. 2020/2021	BAYU PRESTIANTO, S.E., M.M. TRI ADHI SANTOSO, SE., MM
7	SURVEI KEINGINAN MENJADI PENGUSAHA MAHASISWA ANGKATAN 2021 PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARAN	MARKUS WIDYANTO, S.E., M.M. Dr WIDURI KURNIASARI, S.E., M.Si. BAYU PRESTIANTO, S.E., M.M.

8	PENGARUH GREEN DYNAMIC CAPABILITY DAN GREEN INNOVATION TERHADAP KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM SUSTAINABLE FASHIONDIKOTA SEMARANG	Dra. BERNADETA IRMAWATI, M.Si. MENIEK SRINING PRAPTI, S.E., M.Si. Dra. LUCIA HARI PATWORO P, MSI. Drs. Y. SUGIHARTO, M.M.
9	STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS YANG BERBASIS LINGKUNGAN PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA SEMARANG	ENY TRIMEININGRUM, S.E., M.S.I. MENIEK SRINING PRAPTI, S.E., M.Si. Dra. BERNADETA IRMAWATI, M.Si.
10	GREEN HRM: SUATU KAJIAN FENOMENOLOGI	RUDY ELYADI, S.E., M.M. Dr. AGATHA FERIJANI, S.E., MS.HRM.
11	ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA USAHA PADA KELOMPOK USAHA MIKRO DI KEMIJEN KOTA SEMARANG	SHRESTA PURNAMASARI, S.E., M.Sc RUDY ELYADI, S.E., M.M. A. EVA MARIA SOEKESI, S.E., M.M.
12	NIAT BERPERILAKU RAMAH LINGKUNGAN PELAKU UMKM PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DENGAN PENDEKATAN TPB	Dr. RETNO YUSTINI WAHYUNINGDYAH, M.Si. MG. WESTRI KEKALIH S., S.E., M.E.
13	IDENTIFIKASI TINGKAT DAN PENYEBAB ACADEMIC CYBER LOAFING SELAMA PEMBELAJARAN DARING PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIKA SOEGIJAPRANATA	CH. TRI HARJANTI NUGRAHANINGSIH, S.E., M.Si. Dra. BERNADETA IRMAWATI, M.Si.
14	TRACER STUDY PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA TAHUN LULUS 2017-2020	A. HARYO PERWITO, S.E., MA.TRM. SHRESTA PURNAMASARI, S.E., M.Sc LISTIA SEPTA KEFASIA NARARYA, SE., MM
15	HIPOTHESIS PASAR EFISIEN BENTUK KUAT: KAJIAN TERHADAP ABNORMAL RETURN PRE CORPORATE ACTION PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2019	Y. WISNU DJATI SASMITO, S.E., M.Si. MILKA JESSICA SAMSUDIN NATHALIA AUDREY SUKMA AYU KUSUMASTUTY PATRICIA PUTRI WAHYUNINGRUM RICKY DWI BUDI HARSONO, S.E., M.Si. Dr WIDURI KURNIASARI, S.E., M.Si.
16	GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) di KAWASAN WISATA SAM POO KONG KOTA SEMARANG	Drs. B. JUNIANTO WIBOWO, M.S.M. VERONICA KUSDIARTINI, S.E., M.S.I. DYAH TITISARI ANUGRAHENI, S.E., M.M.

Semarang, 02 November 2022

Dekan,



**DRS. THEODORUS SUDIMIN, MS**  
 NPP: 058.1.1990.074





# SERTIFIKAT

— MANAGEMENT RESEARCH SEMINAR —

Diberikan kepada:

**MG. Westri Kekalih S., S.E., M.E.**

Sebagai:

**PRESENTER**

KETUA PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN



UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Progdi. Manajemen

Dr. Widuri Kurniasari, S.E., M. Si.

KETUA PUSAT PENGAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN MANAJEMEN

MG. Westri Kekalih S., S.E., M.E.



# **KAJIAN EFEKTIVITAS BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) MASA PANDEMI COVID-19**

MG Westri Kekalih Susilowati, Ch. Yekti Prawihatmi , Retno Yustini  
Wahyuningdyah

## **Abstrak**

*Pandemi Covid-19 berdampak sangat luas. Tidak hanya status kesehatan yang secara masif menurun, namun juga pada aspek yang lain, termasuk aspek ekonomi. Salah satu pelaku ekonomi dengan kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa dalam lain sebagainya adalah usaha mikro. Oleh karena itu pemerintah memberi perhatian yang besar pada sektor usaha mikro dalam bentuk insentif dan bantuan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah permasalahan, dan beberapa penelitian berdasarkan data sekunder menunjukkan adanya kekurangefektifan dari bantuan usaha mikro tersebut. Dalam beberapa penelitian terdahulu memberikan catatan keterbatasan penelitiannya, yakni penelitian tersebut hanya menggunakan input data-data sekunder dari buku-buku dan juga literatur lainnya, dokumentasi data terbatas pada beberapa berita yang ditriangulasi dengan beberapa sumber sekunder lainnya. Oleh karenanya merekomendasikan penelitian selanjutnya dengan melakukan survey secara langsung kepada kelompok penerima manfaat (KPM) bansos agar diperoleh informasi lebih mendalam terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi efektivitas bantuan usaha mikro dengan menggunakan input primer, yakni persepsi kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan tersebut dengan pendekatan deskriptif dan uji beda rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPUM efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM*

**Keywords:** UMKM; BPUM; Usaha Mikro; Bansos, Pandemi.

## **PENDAHULUAN**

sektor usaha mikro merupakan sektor yang sangat terdampak oleh adanya pandemi covid-19. Karena pandemi covid 19, usaha mikro mengalami penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh (mediaindonesia.com). Hasil penelitian yang kerjasama BPPID dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ganesha Sisingamangaraja menemukan dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19 bagi UMKM di Kabupaten Buleleng antara lain penurunan

penjualan, penurunan laba usaha, permasalahan modal meningkat, melakukan pengurangan karyawan, dan menurunnya kemampuan pembayaran angsuran bank. Terdapat empat permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha mikro pada masa pandemi yaitu penurunan penjualan sebagai akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku (Vina Natasya; Pancawati Hardiningsih, 2021). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) (setidaknya mencatat sebanyak 949 laporan terkait dampak covid 19 terhadap koperasi dan UMKM. Secara umum, laporan permasalahan terkait dengan dampak covid 19 antara lain mengalami penurunan penjualan, sulit mendapatkan bahan baku, terhambatnya distribusi, mengalami kesulitan permodalan, dan terhambatnya produksi (Kompas, 27 maret 2020),

UMKM khususnya usaha mikro memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Data statistik Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa, sekitar 97 persen unit usaha di Indonesia adalah termasuk dalam kategori Usaha Mikro. Kontribusi usaha mikro terhadap PDB mendekati 60 persen. Sektor tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja 97 persen dari total tenaga kerja nasional, jauh lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar yang hanya menyerap sekitar 3 persen saja (depkop.go.id, 2 September 2020). Oleh karena itu, penurunan kinerja usaha mikro berarti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan angka pengangguran serta kemiskinan serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah memberikan berbagai insentif dan bantuan kepada usaha mikro. Berbagai program yang secara khusus ditujukan untuk usaha mikro yaitu, Subsidi Bunga, Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit, Belanja Imbal Jasa Penjaminan, Penjaminan untuk Modal Kerja PPh final Ditanggung Pemerintah, dan Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LDPB (Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021). Insentif yang sangat disambut baik oleh para pelaku usaha mikro adalah BPUM dan subsidi bunga KUR. Berbagai bantuan tersebut tentu diharapkan efektif dalam membantu keberlangsungan para pelaku usaha mikro baik di masa pandemi maupun di masa pemulihan ekonomi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan ada beberapa permasalahan terkait dengan insentif dan bantuan untuk UMKM dalam rangka penanganan dampak covid-19 terhadap UMKM. Permasalahan pokok diantaranya adalah keterbatasan alokasi anggaran serta masalah pengelolaan dana agar cepat dan tepat mengenai sasaran. Teja (2020) juga menyatakan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial senantiasa timbul saat bantuan sosial digelontorkan pemerintah (cnnindonesia.com) karena

berbagai permasalahan. Penelitian terdahulu mengenai efektivitas bantuan masa pandemi, termasuk bantuan kepada UMKM lebih banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka evaluasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini seperti kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM. Kajian tersebut menyarankan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai evaluasi dampak dan pelaksanaan program sehingga prinsip *evidence-based policy* dapat diimplementasikan sebaik-baiknya. Survei SMRC, 2020 menyimpulkan bahwa bantuan sosial dari pemerintah belum berjalan efektif. Beberapa permasalahan masih terjadi hampir diseluruh lini JPS baik dari hulu hingga ke hilir yang disebabkan karena validitas data.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pandemi covid-19 telah menyebabkan berbagai sektor bisnis mengalami perlambatan. Beberapa sektor yang paling terdampak antara lain sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, farmasi, dan transportasi. Dalam situasi krisis, UMKM yang memiliki peran signifikan terhadap perekonomian dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, produk domestik/penyediaan barang dan jasa, pendapatan masyarakat, dan lain-lain juga merupakan sektor yang justru dapat dikatakan paling terdampak karena sebagian besar merupakan usaha informal. Sektor informal merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya berbagai pembatasan seperti kerumunan maupun pembatasan jam operasi. Menyadari hal tersebut, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan kepada UMKM melalui program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020, yang menggantikan Perpu pengganti UU nomor 1 tahun 2020, untuk melakukan program-program PEN pemerintah dapat (1) melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN); (2) Penempatan Dana; (3). Investasi Pemerintah; dan/atau (4) Penjaminan Dukungan Usaha untuk UMKM. Secara lebih terperinci, penjaminan dukungan usaha bagi UMKM pada tahun 2020 terdiri dari Subsidi Bunga Rp34,15 T, Insentif Pajak (PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP) Rp28,06 T, Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM Rp6 T. Selain itu, pemerintah juga memberikan Stimulus Kredit UMKM seperti subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan dengan total nilai Rp34,15 T, Penundaan angsuran & subsidi bunga 6 persen selama 3 bulan pertama dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya, Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan dengan total nilai Rp0,49 T. Melalui kementerian koperasi dan UMKM yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2020, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada UMKM sebesar Rp2,4 Juta per UMKM. Program tersebut dilanjutkan dengan program BLT periode 2 berdasarkan Permenkop Nomor 2 Tahun 2021. Secara keseluruhannya seluruh alokasi anggaran penanganan covid-19 pada tahun 2020, sebesar 17,75 persen atau Rp123, 47 triliun diakulasikan untuk UMKM.

Ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata, proses distribusi yang memerlukan waktu lama untuk sampai kepada penerima manfaat, penyelewengan dana, pungutan liar juga masih terjadi. Kajian dengan judul Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB menunjukkan keefektifan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dimasa Pandemic Covid-19 tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat belum baik. Sementara itu LIA, FITRIANI (2021) menemukan bahwa fakta di lapangan bantuan UMKM masih kurang efektif karena beberapa faktor seperti tidak semua UMKM bisa mengakses informasi baik, nilai bantuan UMKM masih belum bisa menutupi nilai kerugian, dan data statistik pelaku UMKM yang ada kurang akurat.

Penelitian Gunadi dkk (2021) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan BPUM kurang efektif adalah distribusi program tersebut lebih mengandalkan jalur formal seperti bank, menyebabkan UMKM nonformal dan unbanked masih tertinggal. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro tidak mengetahui program PEN atau tidak mengetahui cara mengaksesnya. Ketidakefektifan bantuan bagi pelaku usaha mikro tersebut didukung dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Noni Noerkaisar (2021), yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sampai dengan saat ini belum berjalan efektif, belum mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Pungutan liar atau pemotongan bantuan dan penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan mengakibatkan penurunan jumlah manfaat bansos yang diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian yang sama, Nomi Noerkaisar memberikan catatan keterbatasan penelitiannya, yakni penelitian tersebut hanya menggunakan input data-data sekunder dari buku-buku dan juga literatur lainnya, dokumentasi data terbatas pada beberapa berita yang ditriangulasi dengan beberapa sumber sekunder lainnya. Oleh karenanya merekomendasikan penelitian selanjutnya dengan melakukan survey secara langsung kepada kelompok penerima



manfaat (KPM) bansos agar diperoleh informasi lebih mendalam terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penyaluran bantuan sosial secara khusus pada usaha mikro dengan menggunakan pendekatan persepsional yang mengukur sejauh mana usaha mikro penerima bantuan merasa memperoleh manfaat atau dampak bantuan tersebut terhadap aktivitas usahanya yang terdampak pandemi, serta memperoleh gambaran mengenai penggunaan bantuan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi efektivitas penyaluran BPUM pada usaha mikro secara numerik dengan melihat perkembangan omset maupun dengan menggunakan pendekatan persepsional tentang sejauh mana usaha mikro penerima bantuan merasa memperoleh manfaat atas bantuan tersebut bagi aktivitas usahanya yang terdampak pandemi, serta memperoleh gambaran mengenai pengelolaan bantuan tersebut. Efektivitas penyaluran dana diukur berdasar persepsi pelaku usaha mikro atas pengetahuan terhadap BPUM, kemudahan memperoleh bantuan, persepsi kondisi usaha yang dirasakan sebelum dan sesudah menerima bantuan (dampak BPUM yang dipersiapkan), dan kepuasan terhadap bantuan. Jika terdapat peningkatan omset setelah menerima usaha dan pelaku usaha mikro mempersepsikan bahwa usahanya meningkat setelah menerima bantuan dan berbeda signifikan dengan sebelum usahanya mendapatkan bantuan langsung tunai, maka bantuan tersebut dipandang efektif. Efektivitas tersebut juga dilihat dari persepsi kepuasan atas program BPUM. Untuk menjawab tujuan penelitian ini digunakan data primer.

Sampel ditetapkan sebanyak 100 responden usaha mikro dengan pertimbangan kecukupan sampel untuk uji statistik. Sampel merupakan penerima bantuan langsung tunai, berdomisili di Semarang, dan bersedia menjadi responden. Namun demikian, hasil validasi terhadap kuesioner, hanya terdapat 93 kuesioner yang dinyatakan valid untuk diolah lebih lanjut. Pemilihan sampel ditetapkan secara *purposive convenience sampling*.

Untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai berbagai faktor serta persepsi yang terkait dengan insentif dan bantuan usaha mikro, penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis deskriptif rentang skala. Untuk menyimpulkan efektivitas bantuan usaha mikro pada masa

pandemi, penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata digunakan untuk mengidentifikasi ada-tidaknya perbedaan persepsi kondisi yang terkait dengan aktifitas usaha sebelum dan setelah menerima insentif/bantuan. Sesuai dengan karakter sampel, yakni sampel dependen uji paired t-test yang akan diolah dengan SPSS dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0$  :  $\mu_1 = \mu_2$  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja usaha sebelum dan sesudah menerima BPUM

$H_1$  :  $\mu_1 \neq \mu_2$  Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja usaha sebelum dan sesudah menerima BPUM

Titik kritis ( $\alpha$ ) ditentukan sebesar 0,05 atau (5%) dengan daerah kritis sebesar  $n - 1$  (16).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran diri responden menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar (72%) responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan minimal SMA (46,24% SMA, 25,81% Sarjana) dengan umur lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan umur tersebut, maka sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki status marital menikah dengan jumlah tanggungan antara 3 – 4 (tidak termasuk diri sendiri). Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut diharapkan adanya kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya atas beberapa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni melakukan analisis mengenai efektifitas bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM), khususnya pada masa pandemi semua responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan dari pemerintah khususnya pada masa-masa pandemi. Adapun karakteristik usaha responden adalah bentuk usahanya, sebagian besar (58,06%) merupakan usaha rumahan atau rumah tangga, 17,20% berbentuk Perusahaan Perorangan, dan 20,43% lainnya yang sebagian besar (68,37%) bergerak dibidang produksi. Hampir semua responden (97,85%) hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 5 orang. Mengenai sumber permodalan, nampaknya para pelaku usaha menggunakan beberapa sumber. Sumber utama modal adalah modal sendiri dan dari kerabat. Semua responden menggunakan kedua sumber modal ini. Selain itu, sebagian besar (60%) pelaku usaha juga memanfaatkan sumber modal dari pinjaman bank. Pinjaman koperasi

dilakukan oleh 25% responden. Tidak ada responden yang menyatakan menggunakan sumber permodalan dari bantuan pemerintah.

### **Sumber Informasi dan Pengetahuan tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)**

Pandemi COVID-19 yang menerpa sejak awal tahun 2020 menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dengan berbagai dampaknya pada sector-sektor ekonomi nasional, terutama sektor informal. Sektor informal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan, pihak yang paling terdampak. Adanya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendisrupsi aktivitas ekonomi UMKM untuk dengan leluasa beraktivitas yang cenderung banyak dilakukan secara tatap muka. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 84% usaha mikro kecil (UMK) menyatakan mengalami penurunan pendapatan dan produksi sebagai dampak dari penurunan daya beli konsumen. Bahkan Asian Development Bank (ADB) terdapat sekitar 50% pelaku usaha mikro terpaksa menutup usahanya sementara.

Untuk mengatasi dampak negatif COVID-19, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai mitigasi, diantaranya adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan pertama kali oleh Presiden RI pada 14 Juli 2020. Program yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait dengan skema bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dengan kategori miskin dan rentan. BPUM juga merupakan salah satu alokasi prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha rumah tangga/ usaha mikro. Sebagai salah satu tindakan mitigasi, BPUM disosialisasikan kepada kelompok sasaran melalui beberapa saluran dan media seperti Dinas Koperasi dan UKM di daerah, Kementerian/Lembaga, Perbankan, dan BUMN/BLU.

Mengenai sosialisasi BPUM, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok sasaran memperoleh informasi BPUM tidak hanya dari satu sumber. Informasi mengenai PBUM terbanyak diperoleh dari kantor pemerintah (64,52%) disusul kelompok usaha (62,37%), kolega yakni perusahaan/UMKM lain (59,14%), dan sosialisasi oleh pemerintah diluar kantor pemerintahan (52,69%). Dengan melihat sebaran tersebut dapat dilihat bahwa sumber yang paling efektif adalah sosialisasi oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar kantor pemerintahan serta sesama pelaku usaha baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Sementara itu, dilihat dari

media informasi yang digunakan, pelaku usaha memperoleh informasi dengan media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan Facebook maupun secara langsung (words of mouth/WOM) yang dilakukan dengan sesama kolega maupun dalam arti secara langsung diundang oleh pemerintah yakni dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas Koperasi dan UMKM.

### **Pengetahuan dan Jenis BPUM yang Diterima**

UMKM mendominasi unit usaha dalam perekonomian Indonesia, yakni dengan proporsi 99,99% dari seluruh unit usaha yang ada, dan yang berkategori usaha mikro tercatat 98,67% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020). Permasalahannya, sektor UMKM ini merupakan sektor yang paling terdampak ketika terjadi gejolak perekonomian termasuk Covid 19. Oleh karenanya menjadi berasalasan dan sangat tepat jika pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini (terutama pada masa pandemi) karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan, A. K, 2020). Beberapa jenis bantuan yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk UMKM antara lain Penundaan dan Subsidi Bunga bagi UMKM yang mendapat kredit dari Lembaga keuangan; Penjaminan Kredit Modal Kerja Baru; Penempatan dana di Lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit UMKM; dan PPh final sebesar 0,5 % ditanggung pemerintah bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Bantuan Pelaku Usaha Mikro tersebut merupakan arahan Presiden terkait dengan upaya membantu keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha mikro.

Sebagai bagian yang integral dari kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, sosialisasi atas program tersebut memiliki peran penting. Implementasi sosialisasi yang kurang baik menyebabkan pengetahuan kelompok sasaran terhadap program rendah, sehingga menimbulkan kendala seperti informasi alur pendaftaran yang tidak jelas, kesulitan dalam hal administrasi, dan harus bolak-balik mengurus dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai jenis-jenis BUPM rendah. Penelusuran lebih lanjut mengenai pengetahuan yang rendah dalam hal ini memiliki arti yang beragam antara lain kecenderungan tidak mengetahui adanya jenis bantuan tertentu, tidak mengetahui cara mendapatkannya, serta tidak mengetahui alur, prosedur dan persyaratannya. Terdapat juga responden yang bahkan mengatakan belum pernah mendengar istilah dalam jenis bantuan, yakni imbal jasa penjaminan (IJP). Jenis bantuan yang paling banyak diketahui (berada pada kategori tinggi) adalah bantuan langsung tunai. Mengenai bantuan langsung tunai, responden



juga cenderung mengerti nilai bantuannya yakni Rp2,4 juta untuk setiap pelaku usaha. Dua jenis bantuan yang cukup banyak dikenal adalah penurunan tarif pajak dan PPh final ditanggung pemerintah. Kondisi demikian mencerminkan implementasi sosialisasi yang kurang baik, juga (dimungkinkan) kurang merata. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat diduga menjadi penyebab kurang baiknya implementasi sosialisasi. Meskipun program disosialisasikan dengan berbagai media, namun bukan saluran ideal karena mengandung hambatan komunikasi. Komunikasi yang interaktif terbaik adalah jika sosialisasi dilakukan dengan tatap muka.

Dari keseluruhan program untuk pelaku usaha mikro. Bantuan langsung tunai kepada pelaku usaha mikro merupakan jenis bantuan yang paling banyak diterima. Dalam penelitian ini tidak ada satu respondenpun yang menikmati jenis bantuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) karena Imbal Jasa merupakan hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak sebagai Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR (Permenkeu, 2008). Demikian juga, tidak ada responden yang memperoleh bantuan dalam bentuk penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit, belanja imbal jasa (IJP), penjaminan kredit modal kerja karena pelaku usaha mikro bukan sasaran langsung program tersebut. Sebagai contoh, program penjaminan kredit modal kerja merupakan program yang diberikan kepada perusahaan

### **Dampak Bantuan yang Dirasakan**

BPUM dimaksudkan untuk membantu dan mempertahankan kesinambungan usaha pelaku usaha mikro dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya dalam menghadapi tekanan dampak COVID-19. BPUM merupakan bantuan dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung kepada pelaku usaha mikro yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, evaluasi efektifitas bantuan tersebut penting untuk diidentifikasi. Secara numerik, efektifitas tersebut dapat dilihat dari perkembangan usaha, yakni apakah terdapat perubahan kinerja usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan. Namun demikian, dengan melihat perubahan kinerja dengan pengukuran numerik saja belum cukup, karena kinerja usaha juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain selain bantuan yang diterima seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan, adopsi teknologi, kreatifitas, dan faktor-faktor lainnya

Penelitian ini melakukan pengukuran efektifitas bantuan BPUM secara kualitatif dengan melihat dampak bantuan yang dirasakan oleh penerima bantuan. Efektifitas bantuan ditelusur pada berbagai aspek dalam usaha mikro yang terdampak yakni aspek usaha, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek sumberdaya manusia, dan aspek kebermanfaatan bagi masyarakat. Tabel 4.3 menyajikan dampak yang dirasakan atas merebaknya COVID 19 dan kondisi sebelum menerima bantuan serta kondisi usaha yang dirasakan setelah menerima bantuan. Pada semua aspek yang diteliti menunjukkan adanya dampak positif dari bantuan BPUM yang tercermin pada nilai rata-rata dampak Covid 19 dan setelah menerima bantuan yang dipersepsikan.

Secara statistik, terdapat perbedaan yang signifikan mengenai dampak bantuan yang dipersepsikan tersebut, tercermin pada uji beda rata-rata persepsi kondisi usaha sebelum dan setelah menerima bantuan. Uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan menunjukkan besarnya probabilitas signifikansi 2 sisi sebesar 0,000 pada interval keyakinan 95%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPUM efektif dalam menjaga dan mempertahankan keberlangsungan usaha mikro, khusus nya pada masa pandemi covid 19. Kondisi demikian dapat digeneralisasi pada situasi tanpa pandemi, yakni bahwa bantuan pemerintah efektif untuk meningkatkan kinerja usaha mikro. Keefektifitas BPUM yang dipersepsikan berdampak positif terhadap kinerja usaha tersebut didukung oleh kinerja usaha yang sesungguhnya, yakni pada rata-rata omset perbulan sebelum pandemi, pada masa pandemi, dan setelah memperoleh BPUM. Terdapat beberapa usaha yang terhenti kegiatan operasionalnya pada masa pandemi dan beroperasi setelah menerima BPUM. Secara keseluruhan, pandemi Covid 19 berdampak negatif terhadap kinerja usaha UMKM yang tercermin pada penurunan omset, meskipun terdapat UMKM yang justru mengalami peningkatan omset pada masa pandemi. Program BPUM yang bertujuan menjaga keberlangsungan usaha terbukti efektif secara parametrik yang tercermin pada peningkatan omset setelah menerima BPUM meskipun secara rata-rata BPUM belum dapat mengembalikan kondisi usaha seperti sebelum pandemi. Kondisi tersebut tercermin pada nilai rata-rata omset sebelum pandemi pada kisaran Rp5.000.000,00; Rp2.000.000,00 pada masa pandemi; dan Rp3.000.000,00 setelah menerima BPUM

Untuk dapat diproses lebih lanjut, yakni uji beda rata-rata dipersyaratkan data terdistribusi normal. Uji normalitas data yang diolah dengan menggunakan program statistik SPSS menunjukkan data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Baik pada sebaran omset per bulan

sebelum pandemi, pada masa pandemi, maupun setelah menerima BPUM dengan probabilitas signifikansi 0,000 pada alfa 0,05.

Uji beda rata-rata dua sampel berpasangan pada semua pasangan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada dengan Sig. (2-tailed) 0,000 baik untuk perbedaan omset sebelum pandemi dengan pada masa pandemi, pada masa pandemi (sebelum menerima BPUM) dengan setelah menerima BPUM, dan pada masa pandemi dengan setelah menerima bantuan. Perbedaan yang terbukti signifikan antara rata-rata omset sebelum pandemi dengan setelah menerima bantuan mencerminkan bahwa BPUM efektif untuk menjaga keberlangsungan UMKM meskipun belum dapat mengembalikan kondisi omset sama seperti sebelum masa pandemi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dukungan finansial memberikan kekuatan bagi UMKM untuk menutupi biaya operasional dan bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Dukungan finansial dapat berupa pencairan dana stimulus dalam bentuk tunai atau kredit, pengurangan pajak, keringanan bunga kredit, penangguhan pembayaran pajak, pengurangan biaya sewa, pembebasan biaya administrasi hingga pembukaan akses pembiayaan atau permodalan. Selain dukungan finansial, juga dilakukan untuk mempercepat digitalisasi UMKM untuk membuka akses pasar ekspansi (Gunartin et al., 2021).

### **Persepsi Kemudahan Memperoleh Bantuan**

Kelompok sasaran bantuan yang direpresentasikan oleh responden cenderung menilai bahwa bantuan cukup mudah diperoleh. Kemudahan tersebut mencakup persyaratan, prosedur, memperoleh informasi, serta secara keseluruhan. Pada semua komponen yang ditanyakan berada dalam kategori sedang. Sebagaimana diketahui, persyaratan menjadi penerima BPUM yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. memiliki KTP Elektronik;
3. memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
4. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Cara mendaftarkan diri menjadi penerima BPUM cukup mudah, yakni dengan mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten/kota masing-masing sebagai dinas yang mengusulkan penerima BPUM

Penerima BPUM cukup puas dengan program tersebut. Kondisi tersebut tercermin pada penilaian atas beberapa indikator terpilih maupun keputusan secara keseluruhan yang tercermin pada nilai rata-rata total variabel kepuasan sebesar 2,83. Tingkat kepuasan yang berada pada kategori sedang atau cukup puas tersebut berlaku pada semua indikator terpilih yakni ketepatan sasaran, bentuk, mekanisme pencairan, penanganan pengaduan permasalahan, kecepatan pencairan, waktu, serta kemudahan dalam memperoleh bantuan. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan atribut Motivasi (endogen), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima senang atas bantuan langsung tunai dalam mempertahankan usahanya, dan gembira ketika orang memuji keberhasilan dalam mempertahankan usahanya selama pandemi Covid 19 (Nor Faezah Mohamad Razi, Nor Aslily Sarkam, Nor Hazlina Mohammad, Nur Hasni Nasaruddin, 2022).

Tujuan dari BPUM adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun demikian, masih terdapat penggunaan BPUM yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yakni dengan menggunakan semua (7,53%) atau sebagian besar (34,41%) atau setengah (4,30%) dari bantuan yang diterima untuk kepentingan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas usaha seperti menutup utang keluarga, membayar sekolah, membeli televisi, belanja pangan/sandang, dan lain-lain. Meskipun hanya terdapat sedikit responden yang menggunakan semua BPUM untuk membayar utang usaha, pembelian bahan mentah/bahan baku, menambah modal usaha, dan mengembangkan usaha/produk baru, namun lebih dari 80% responden menggunakan minimal setengah dari BPUM untuk keperluan tersebut. Secara terperinci, responden yang menggunakan BPUM minimal setengah dari BPUM sebanyak 81,72%, membeli bahan mentah/bahan baku dilakukan oleh sebanyak 89,25%, menambah modal usaha dilakukan oleh sebanyak 81,72% dan mengembangkan usaha/produk baru (61,29%)

## **PENUTUP**

Terdapat beberapa kesimpulan terkait dengan efektifitas BPUM, yaitu: 1) Pengetahuan kelompok penerima sasaran BPUM mengenai jenis bantuan, nilai bantuan, lamanya program bantuan, persyaratan, dan prosedur memperoleh bantuan rendah; 2) Dalam penelitian ini, jenis bantuan yang paling banyak diterima adalah bantuan langsung tunai yang oleh penerima cenderung digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan yang tidak terkait dengan pengembangan usaha; 3) Secara kualitatif, BPUM cukup efektif untuk meningkatkan kinerja usaha



penerima bantuan baik secara kualitatif yang tercermin pada hasil uji beda persepsi kinerja usaha sebelum dan setelah menerima bantuan dengan kondisi meningkat setelah menerima BPUM yang secara statistik terbukti signifikan. Persepsi peningkatan usaha yang dipersepsikan terjadi pada semua indikator usaha yakni pada aspek usaha, keuangan, sumberdaya manusia, pemasaran maupun kebermanfaatannya bagi masyarakat. Efektifitas yang berada dalam kategori cukup ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan mengenai BPUM yang rendah dan terdapat bagian dari BPUM yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terkait dengan pengembangan usaha; 4) Secara kuantitatif, BPUM efektif untuk meningkatkan kinerja usaha penerima bantuan yang tercermin pada perkembangan omset sebelum-pada masa pandemi-setelah menerima bantuan. Secara statistik, efektifitas tersebut ditunjukkan dengan uji beda rata-rata pada persepsi dampak maupun pada perubahan omset yang signifikan. Terdapat peningkatan rata-rata omset usaha setelah menerima bantuan; 5) Penerima BPUM cenderung merasa cukup puas dengan BPUM ditinjau dari ketepatan sasaran, bentuk bantuan, mekanisme pencairan, penanganan aduan, kecepatan pencairan, ketepatan waktu, dan kemudahan dalam memperoleh bantuan.

Skema bantuan sejenis BPUM masih dapat diteruskan. Agar diperoleh hasil yang lebih optimal atau lebih efektif, pemerintah perlu: 1) Meningkatkan sosialisasi bantuan agar kelompok sasaran memiliki pengetahuan yang baik mengenai bantuan; 2) Melakukan pendampingan atas penggunaan bantuan langsung tunai

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Hendranata, 2020, UMKM Dewa Penyelamat, Kompas, 18 November 2020, Jakarta
- Dewi Wuryandani, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya , Bidang Ekonomi dan Publik
- Dito Aditia Darma Nasution<sup>1)</sup>, Erlina<sup>2)</sup> dan Iskandar Muda<sup>3)</sup> Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (212-224)
- Gunadi , Ahmad Dading, HarryLesmana, Hilda Fachrizah, Mohamad D.Revindo dan Rama V. Daniswara, (2021) , COVID-19 Pandemic and MSMEs in Indonesia:Impact and Policy Responses, Jurnal Ekonomi Indonesia Volume 10 Number 2, 2021: 143–171
- Gunartin, Pratikto, H., & Sopiah. (2021). Financial Support on SMEs Impact of the Covid 19 Pandemic: A Literature Review. *Scientific Journal of Management*, 9(2), 682–689.

Lia, Fitriani (2021) *Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Povinsi NTB*. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Natasya, Viva dan Pancawati Hardiningsing (2121). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi, *Journal of Economics and Business*, 5(1), Maret 2021, 141-148 Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari

Noerkaisar, Noni (2021), Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia, IPB.

Nor Faezah Mohamad Razi, Nor Aslily Sarkam, Nor Hazlina Mohammad, Nur Hasni Nasaruddin, R. A. J. (2022). Does financial assistance (GKP) for SMEs-during the Covid 19 pandemic, help to improve their survivability and sustainability? *Social Science Journal*, 28.

Prahalad, C.K., 2004, *The Fortune at the Bottom of The Pyramid*, Wharton School Publishing, USA

Rokhim, Rofikoh (2020), Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Masa Pandemi: Tantangan Perencanaan Daerah, Pengurangan Kemiskinan, dan Dampak terhadap Sektor Publik (Materi PPT Webinar)

Zafrullah ,Achmad Tayibnapis, , M.S., CIQaR KEBANGKITAN UMKM DI INDONESIA, FEB, Univeritas Surabaya

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/326539/menaker-beberkan-masalah-umkm-di-tengah-pandemi>).

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008201256-532-556227/6-masalah-penyaluran-bansos-selama-pandemi-corona>

----- (2020). Dampak Pandemi Covid 19 terhadap UMKM Di Kabupaten Buleleng Kerja Sama Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Berbagai peraturan Pemerintah (Undang-undang, PP, Peraturan Menteri)







# **KAJIAN EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)**

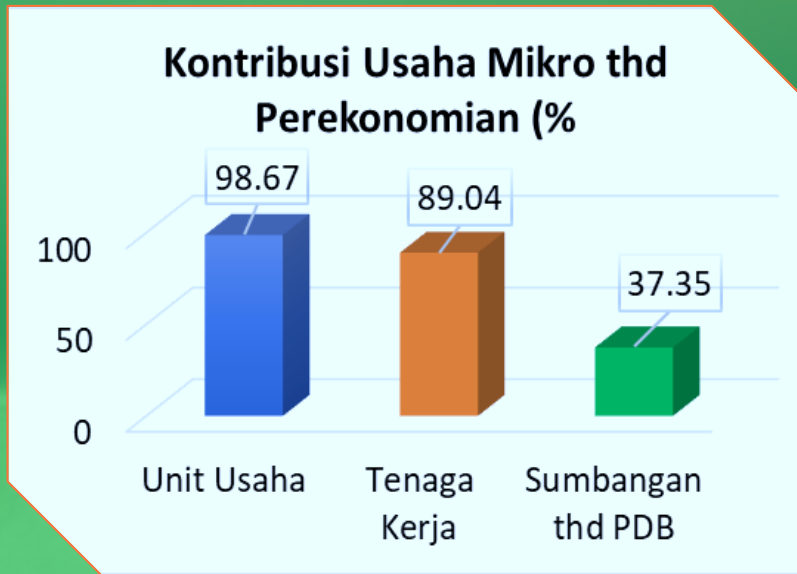


*MG WESTRI KS  
RETNO YUSTINI W  
CH. YEKTI P*

*DIPRESENTASIKAN DALAM:  
**MANAGEMENT RESEARCH SEMINAR**  
SEMARANGM 2, 16 NOVEMBER 2022*

# LATAR BELAKANG dan PERMASLAHAN

Usaha Mikro merupakan sektor yang paling terdampak Pandemi



PANDEMI  
COVID 19

BERPOTENSI  
MENGHAMBAT  
PERTUMBUHAN  
EKONOMI

PERTUMBUHAN  
EKONOMI

➤ PENYELAMAT  
PEREKONOMIAN SAAT  
KRISIS

BPUM

EFEKTIFKAH?

# TINAJUAN PUSTAKA

PANDEMI DAN  
KONTRAKSI  
EKONOMI

BERBAGAI  
SKIM BANTUAN  
UMKM

UMKM DAN  
PERANNYA THD  
PEREKONOMIAN

**PENELITIAN  
TERDAHULU**

BELUM  
EFEKTIF

- Tidak merata, proses lama, penyelewengan dana, pungutan liar

Akses informasi kurang baik, nilai bantuan UMKM belum bisa menutupi nilai kerugian, dan data pelaku UMKM kurang akurat.

# METODE PENELITIAN

## VARIABEL

- ASPEK USAHA
- ASPEK KEUANGAN
- ASPEK PEMASARAN
  - ASPEK SDM
  - ASPEK KEBERMANFAATAN BAGI MASYARAKAT

## DATA

- JENIS: PRIMER  
→ PERSEPSI
- METODE PENGUMPULAN: KUESIONER  
→ SKALA LIKERT 1 - 5

**OBYEK:**  
PERSEPSI  
EFEKTIVITAS  
BPUM

## TEKNIK SAMPLING

- JUMLAH RESPONDEN: 93
- TEKNIK: PURPOSIVE CONVENIENCE

## METODE ANALISIS

- DESKRPTIF
- RENTANG SKALA
  - < 2,33 : Rendah
  - $2,33 \leq X < 3,66$ : Sedang
  - $\geq 3,66$  : Tinggi
- UJI BEDA RATA-RATA

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## **PROFIL RESPONDEN:**

Pendidikan: SMA+sarjana  
(72,05%)

Usia: 30-50th (77,75%)

Marital: Menikah (90,32%)

Juml Tanggungan: 3-4  
org (70,96%)

...

## **PROFIL USAHA:**

Bentuk BU: IRT

Bidang usaha: Produksi,  
Dagang

Skala: Mikro

Juml TK: <5 org

Asal Modal:

Sendiri+Kerabat

...

...

...



# INFORMASI BPUM

## SUMBER INFORMASI

- Kantor Pemerintah
- Kelompok Usaha (UMKM lain)
- Forum Sosialisasi oleh pemerintah

## MEDIA INFORMASI

- Media Sosial (WA, Instagram, Face Book)
- WOM
- Televisi

## JENIS BPUM YANG (PALING BANYAK) DIKETAHUI

- BLT
- DTP

# DAMPAK BPUM

## PERSEPSI DAMPAK BPUM YANG DIRASAKAN

- BPUM meningkatkan kinerja pada semua aspek usaha yang secara statistik terbukti signifikan

## DAMPAK RIIL: OMSET/BULAN

Waktu	Minimum	Maximum	Mean
Sblm Pandemi	3,000,000	30,000,000	5,053,333
Masa Pandemi	1,500,000	20,000,000	2,215,833
Stl terima BPUM	5,000,000	22,500,000	3,340,833

# PRESEPSI THD BPUM



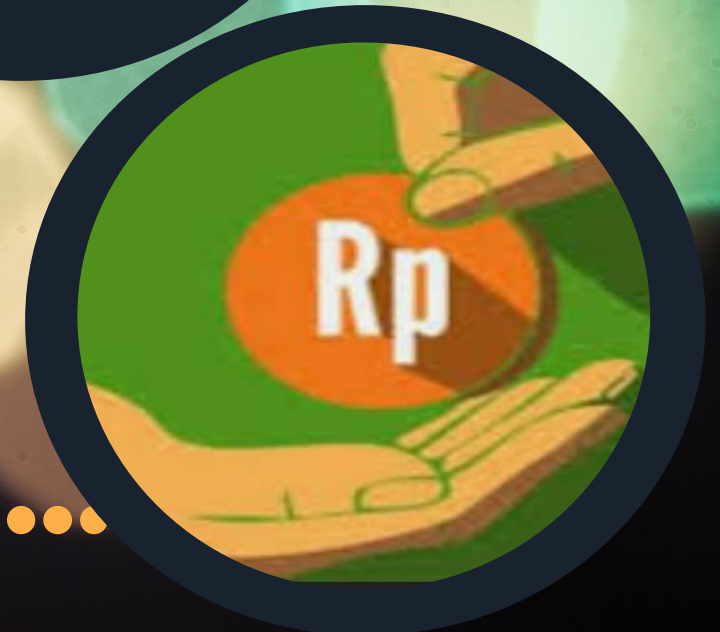
**Penggunaan BPUM:**  
Kepentingan keluarga yang tidak terkait dengan aktivitas usaha,  
Membayar utang usaha,  
Membeli bahan baku, menambah modal, mengembangkan produk



**Kemudahan Memperoleh BPUM**  
(persyaratan, prosedur, informasi):  
**SEDANG**



**Kepuasan atas BPUM**  
(Ketepatan, bentuk, mekanisme, pengaduan, kecepatan, waktu, kemudahan):  
**SEDANG**





# PENUTUP

## KESIMPULAN

**BPUM** cukup efektif untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja usaha mikro pada masa pandemi

## SARAN

1. Meningkatkan sosialisasi bantuan agar kelompok sasaran memiliki pengetahuan yang baik mengenai bantuan.
2. Melakukan pendampingan atas penggunaan bantuan langsung tunai

# TERIMAKASIH

TUHAN MEMBERKATI

# PENUTUP



**BPUM CUKUP EFEKTIF UNTUK  
MEMPERTAHANKAN KINERJA  
USAHA**

